

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang mempunyai tema Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban pada dasarnya belum ada yang menelitiannya. Akan tetapi ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ferri Nicholas Hamisi dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan (Suatu Studi terhadap musyawarah rencana pembangunan di kecamatan jailolo)”. Hasil dari penelitian ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substansi, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efisien, disamping kita juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengambil tema partisipasi politik, namun perbedaannya adalah pada faktor pengambilan kebijakan dan tempat penelitiannya yang berbeda. Manfaat penelitian ini adalah sama-sama memiliki konsep penelitian kualitatif. (Jurnal Governance, Vol. 5, No1, at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1529>)
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Endah dengan judul “Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam mempertahankan masyarakat

mandiri dan sejahtera”. Hasil penelitian ini adalah dengan adanya partisipasi masyarakat maka pembangunan lebih terarah. Kesamaan penelitian ini sama-sama memiliki konsep penelitian partisipasi politik, namun perbedaannya adalah pada partisipasi politik dalam pembangunan Desa dan tempat penelitiannya juga berbeda. Manfaat penelitian ini adalah studi kajian pustaka dapat dimanfaatkan. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2854>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2022.

- c. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rusmini dengan judul “Pelaksanaan Program Kebijakan Desa Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat”. Penelitian ini memiliki kesamaan tentang pokok penelitian yang sama-sama meneliti Desa Mandiri serta metode penelitiannya yang sama. Namun perbedaannya adalah pada posisi pelaksanaan program dan partisipasi masyarakat serta tempat penelitian yang berbeda. Manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan rujukan dalam literatur desa mandiri dan konsep penelitian yang sama. (Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3997>)
- d. Penelitian yang dilaksanakan oleh Abi Ridho Wicaksono dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Mandiri (Studi Pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Penelitian ini

memiliki konsep yang sama. Namun penelitian ini lebih cenderung kepada pembangunan Desa sedangkan penelitian dalam tesis ini berkaitan dengan mempertahankan desa mandiri. Manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan rujukan dalam literatur desa mandiri dan konsep penelitian yang sama. Jurnal Administrasi Publik FIA UB Vol. 3 No. 10 (2015). <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1026>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2022.

2.2 Kajian Teori

Penelitian yang memiliki tema Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Mandiri memiliki Tiga Teori, yaitu teori Partisipasi Politik, Konsep Masyarakat dan Konsep Desa Mandiri.

2.2.1 Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik mengacu pada partisipasi penuh dalam konteks politik, yang mengacu pada partisipasi penduduk dalam berbagai kegiatan politik. Partisipasi warga dalam politik bukan berarti rakyat mendukung keputusan atau kebijakan pemimpinnya, karena kata yang tepat dalam konteks ini adalah kampanye politik. Partisipasi politik adalah partisipasi masyarakat dalam semua tahapan politik, mulai dari pengambilan keputusan hingga pengambilan keputusan, termasuk pelaksanaan keputusan.

Konsep partisipasi politik menjadi sangat penting dalam proses demokrasi deliberatif atau demokrasi. Gagasan demokrasi deliberatif muncul antara lain dari tingginya tingkat ketidaktertarikan Barat terhadap politik, yang menyebabkan

tingkat partisipasi pemilih rendah (sekitar 50-60%). Kebanyakan pemikir Barat yang dengan sengaja mengajukan gagasan demokrasi prihatin dengan banyaknya kelompok yang tidak merasa perlu untuk berpartisipasi dalam sistem politik yang representatif atau yang tidak puas.

Di Indonesia saat ini, istilah "partisipasi politik" sering mengacu pada dukungan publik terhadap pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh para pemimpin politik dan pemerintah. Misalnya, kata administrator "Saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing". Di sisi lain, kita jarang mendengar suara orang-orang yang berperan penting dalam pengambilan keputusan.

Jika dilihat dari tingkat partisipasi politik masyarakat dalam proses politik pemerintahan, dapat dilihat bahwa:

- Rezim otoriter: orang tidak tahu apa-apa tentang politik dan masyarakat politik.
- Rezim patrimonial: keputusan politik yang tidak mempengaruhi dibuat oleh para pemimpin.
- Bentuk partisipasi: Warga negara dapat mengubah keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang.
- Pemerintahan demokratis: warga negara memainkan peran penting dalam memperkuat kesatuan politik.

Michael Rush dan Philip Althoff (Cartini Cartono, 1983: 22) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah partisipasi orang-orang pada tingkat yang berbeda dalam sistem politik. Merriam Budiardjo (Budiardjo 1982: 1) memahami partisipasi politik sebagai orang yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, yaitu

mencari jabatan publik dan berpartisipasi dalam kebijakan publik (public policy), partai atau kelompok. Orang-orang yang berhubungan dengan pemimpin atau anggota parlemen dll.

Istilah "peran politik" digunakan dalam pengertian yang berbeda. Apakah partisipasi politik merupakan perilaku murni ataukah termasuk sikap dan perilaku yang diperlukan oleh perilaku tersebut (misalnya informasi politik, persepsi, apakah orang dapat memengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah). Jika partisipasi adalah moral, itu mencakup semua kegiatan yang bermakna secara politik, tetapi apakah artikel ini mendefinisikan partisipasi politik sebagai partisipasi dalam kebijakan publik dan implementasi kebijakan. (Maurice Duverger, 1981:19).

Istilah partisipasi sering dikaitkan dengan desain, keputusan kebijakan, keragaman dan fungsi pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pembangunan. Sementara Bhattacharya (Ndrahda, 1990: 102) mendefinisikan partisipasi sebagai partisipasi dalam tindakan kolektif, Mubarto (Ndrahda, 1990: 102) berpendapat bahwa partisipasi adalah kesediaan individu untuk berkontribusi pada keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuannya. Serahkan properti Anda. Kepentingan mereka sendiri. Wahyudi Kumorotomo (1999:112-114) berpendapat bahwa partisipasi adalah bentuk lain dari kegiatan publik-swasta yang mencerminkan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya.

Corak partisipasi warga dapat dibagi menjadi empat kategori:

1. Partisipasi dalam pemilihan
2. Kelompok partisipasi

3. Hubungan masyarakat dengan pemerintah (pengaduan kepada pemerintah)
4. Partisipasi masyarakat

Demikian pula dengan Soetrisno (Tangkilisan, 2005: 320), partisipasi dipandang sebagai suatu bentuk pembangunan, artinya partisipasi dalam proses pembangunan harus diartikan sebagai upaya untuk mengubah rencana pembangunan, bukan sebagai bagian dari usaha. Perbaikan sistem. . Oleh karena itu, partisipasi harus didefinisikan sebagai biaya tenaga kerja bagi masyarakat dan pemimpin pembangunan untuk bertindak sebagai kekuatan pembangunan. Kerjasama sukarela seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan merupakan jaminan keberhasilan pembangunan. Suharjo (dalam Tangkilisan 2005:321).

Menurut Yadav yang dikutip dalam bukunya Unapdi (1980) ada empat kegiatan yang menunjukkan bagaimana berpartisipasi dalam masyarakat:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
2. Partisipasi dalam melaksanakan kegiatan
3. Berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kemajuan
4. Partisipasi dalam penggunaan solusi pembangunan

Jika Emilia Justinrum dan Wawan Ichwanuddin melihat partisipasi politik dan perilaku memilih pada Pemilu 2014 (2015), ada tiga faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik:

1. Faktor psikologis. Topik ini erat kaitannya dengan pengidentifikasian individu atau komunitas yang memiliki kepentingan politik. Bentuk identitas ini dapat dipengaruhi oleh orang-orang terdekat seperti orang tua dan keluarga. Selain

itu, faktor psikologis meliputi minat seseorang untuk membahas masalah politik.

2. Alasan atau alasan ekonomi. Faktor ini tergantung pada penilaian atau pendapat tergantung pada ekonomi, keluarga dan negara. Refleksi atas realitas ini berdampak positif pada pengambilan keputusan dan partisipasi politik.
3. Faktor sosial. Faktor-faktor tersebut antara lain agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, dan status ekonomi. Semua faktor ini berkontribusi pada aktivitas politik individu atau komunitas, terutama ketika pemimpin atau pejabat pemerintah diidentifikasi.

2.2.2 Pembangunan Politik

Dalam kajian pembangunan politik, ada beberapa konsep yang harus dipahami sebelum menjelaskan pengertian pembangunan politik: perubahan politik, pembangunan, dan reformasi. Pembangunan dan reformasi politik bukanlah perubahan politik (Ramlan Surbakti, 1992). Perubahan politik dapat didefinisikan sebagai fenomena perubahan sifat suatu sistem politik dari satu era ke era lainnya atau dari satu sistem politik ke sistem politik lainnya. Misalnya, dari politik pemerintahan parlementer ke politik demokrasi. Pertanyaannya adalah apakah perubahan itu progresif, yaitu baik, atau buruk, yaitu buruk. Hal ini misalnya dapat dilihat pada era kediktatoran “rezim baru”, dibandingkan dengan pemerintahan pada era reformasi demokrasi, dimana kedaulatan rakyat dilindungi. Hal ini menunjukkan bahwa situasi politik telah menjadi demokratis, yang mungkin diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut.

Konsep pembangunan menyiratkan kegiatan yang direncanakan dengan tujuan yang jelas, proses bertahap dan tanpa kekerasan. Pembangunan politik dapat dianggap sebagai hasil dari pembangunan politik, yang tujuannya adalah pengembangan peluang politik untuk swasembada. Selain itu, modernisasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang bertujuan membentuk cara hidup masyarakat sesuai dengan kekuatan zaman. Dengan demikian, reformasi mencakup unsur-unsur dalam bentuk sistem reformasi masyarakat yang berkelanjutan yang memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat yang tidak terbagi, beragam dan tidak terstruktur dan di dunia yang maju secara teknologi. ., 1992). Dengan demikian, perubahan politik dapat dipahami sebagai ciri dari semua perkembangan dan reformasi politik, serta perubahan dalam sistem nilai politik, institusi pemerintahan, dan strategi politik secara keseluruhan.

Selain itu, konsep pembangunan politik dicirikan oleh struktur asal dan fungsi telekomunikasi (Huntington dan Dominguez dalam Afan Gaffar, 1989). Perkembangan politik dalam geografi - interaksi politik, hubungan politik, dll. Di negara berkembang. Hal ini mengacu pada proses perubahan kebijakan dengan menggunakan konsep dan metode yang digunakan oleh negara-negara maju. Oleh karena itu, perkembangan politik menuju negara-negara berkembang didasarkan pada kurangnya koordinasi, integrasi dan demokrasi di negara-negara berkembang. Fenomena ini menyebabkan ketidakstabilan politik, yang mempengaruhi potensi politik. Akibatnya, pengembangan kebijakan diadopsi untuk mengatasi hal ini.

Pembangunan politik Pembangunan politik dalam bentuk turunannya merupakan fenomena politik dan pengaruh dari keseluruhan proses perubahan, yaitu reformasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pembangunan, pendidikan, media, perubahan sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, pembangunan politik erat kaitannya dengan bidang pembangunan lain seperti ekonomi, masyarakat, budaya dan keamanan. Misalnya, keberhasilan pembangunan ekonomi menyebabkan peningkatan kegiatan pembangunan politik dan sebaliknya. Kurangnya pembangunan politik juga memperlambat proses pembangunan ekonomi. Di sisi lain, jalan buntu pembangunan sosial menyebabkan kemunduran ekonomi dan politik karena selama ini masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk mencapai pembangunan ekonomi atau pembangunan politik. Tentu saja, perlu ada keseimbangan yang jelas di semua bidang pembangunan, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, atau keamanan. Tingkat keseimbangan ditentukan oleh kondisi di masing-masing bidang serta kondisi di luar setiap bidang. Jika tingkat ini tidak tercapai, maka setiap bagian akan segera ditekan dan akhirnya seluruh sistem terpengaruh (Syamsuddin, 1996).

Tren evolusi ilmu politik adalah munculnya perkembangan politik sebagai bidang kajian yang berdiri sendiri dalam disiplin ilmu lain: 1. Ilmu politik 2. Lembaga politik 3. Partai, kelompok dan masyarakat. Konsep 4. Hubungan Internasional. Ilmuwan Barat telah melakukan penelitian ini untuk memahami perubahan sosial dan politik di negara berkembang. Dengan demikian, sifat perkembangan politik cenderung bergeser ke negara-negara berkembang dan

moderasi, integrasi dan demokrasi dianggap tidak mungkin di negara-negara tersebut.

Menurut Huntington dan Domínguez, konsep pembangunan politik mengacu pada wilayah, ruang dan pengalaman:

1. Pembangunan politik mengacu pada struktur masyarakat sosial, politik, hubungan politik, dll. di negara-negara maju. proses perubahan politik di negara berkembang dengan bantuan ide dan metode yang digunakan.
2. Pembangunan politik dalam bentuk turunannya merupakan fenomena politik dan artinya merupakan hasil dari proses reformasi yang kompleks dengan dampak perubahan masalah sosial, perkembangan pertumbuhan ekonomi, kota, pendidikan, media. dll.
3. Pembangunan politik dipahami sebagai proses bergerak menuju satu atau lebih tujuan sistem politik. Tujuan-tujuan tersebut antara lain meliputi, misalnya, keamanan politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi dan mobilisasi. Termasuk juga tujuan pembangunan nasional seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan, demokrasi, keamanan dan kemandirian nasional. (Huntington dan Ramlan Surbakti, 1992)
4. Proses pembangunan politik diartikan sebagai proses perubahan menuju sistem politik yang lebih baik yang ingin dikembangkan suatu negara, misalnya Indonesia ingin mengembangkan sistem politik yang demokratis berdasarkan konstitusi..

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana

dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)". Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana". Sastra atau sastra pembangunan politik berfokus pada konsekuensi politik pembangunan dan bagaimana membedakan antara pembangunan politik dan pembangunan ekonomi. Buku-buku ini dibagi menjadi tiga kategori: a. Salah satunya terkait dengan ide-ide demokrasi, hal. Fokus pada faktor pembangunan dan perubahan kebijakan, dan c) Masalah pembelajaran yang timbul dari pengembangan kebijakan.

Seperti biasa, para ilmuwan politik skeptis terhadap demokrasi. Demokrasi Modern oleh James Bryce (1921) dan Pemerintahan, Konstitusi dan Demokrasi oleh Charles. Unifikasi demokrasi memasukkan isu-isu elektoral dan konstitusional ke dalam analisis politik. Lucian Pye (1965 dan 1966) menekankan pembangunan sebagai penguatan nilai dan praktik Barat. Dia menganjurkan politik multi-partai, multi-partai dan kompetitif, serta ketidakstabilan politik dan menghindari konflik yang intens. Pembangunan demokrasi harus dibarengi dengan pemerintahan yang kuat dan kekuasaan yang stabil. Dalam hal ini, Russell Fitzgibbon (1956) mengumpulkan pendapat para ahli Amerika Selatan dan kriteria untuk mengukur demokrasi politik. Tingkat kebebasan pers, karakteristik sistem kepartaian, kebiasaan memilih, status sosial, dll.

Demokrasi ini selalu tertanam dalam konsep pembangunan politik. Upaya Almond (1965) untuk mendamaikan ortodoksi dengan perkembangan budaya dan

politik adalah contoh dari realitas yang tidak dapat diubah. Melihat perkembangan politik, PYE (1966, khususnya bab 4) memaparkan pandangannya tentang demokrasi Barat sambil menerima berbagai penjelasan atas perubahan tersebut. Banyak penulis yang netral, mencoba menjelaskan arti pembangunan itu statis, dan di sinilah fokusnya pada perubahan. SS Whitaker, Jr. (1967) mengacu pada "Kamus Pembangunan" dan Lewis A. Coser (1957) menekankan "konflik sosial" dalam teorinya tentang perubahan. Robert A. Nisbet (1969) menyajikan sintesis teoritis tentang perubahan dan perkembangan pada abad ke-19 dan ke-20. Dudley Sears (1977) menyajikan perkembangan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia.

Leonard Binder, James S. Coleman, Joseph Lapalombara, Lucian Pye, Sydney Werb, dan Myron Wiener (Binder, 1971). Penelitiannya telah dipublikasikan di tujuh jurnal politik baru-baru ini. Ide-idenya berfokus pada "indikator pembangunan" atau tiga elemen sistem politik: keragaman, kesetaraan, dan pemberdayaan. Diferensiasi mengacu pada "proses menekankan, menumbuhkan, dan menghormati peran dalam masyarakat, seperti perusahaan dan organisasi." Kesetaraan mengacu pada "hukum umum yang mengatur kewarganegaraan, prinsip, dan kemajuan bangsa." Kapasitas mengacu pada kemampuan pemerintah untuk memecahkan masalah dan berinovasi. Ketika negara berkembang melalui keragaman, pertanyaan tentang gender dan potensi mungkin muncul: pertanyaan tentang identitas, legitimasi, peran, pengaruh, dan distribusi.

Masalah identitas berkaitan dengan budaya massa dan elit, perasaan kebangsaan terhadap daerah, perpecahan yang mengancam persatuan bangsa, dan konflik antara kesetiaan etnis dan kewajiban nasional. Karena perbedaan

kekuasaan, masalah hukum akan meningkat. Masalah partisipasi adalah “konflik yang muncul ketika elit penguasa tidak dapat menerima keinginan dan gagasan individu dan kelompok yang ingin berpartisipasi dalam proses politik” (binder 1971:187). Masalah penetrasi “ditandai dengan tekanan dari elit penguasa untuk mengintegrasikan atau mereformasi berbagai institusi. Masalah fragmentasi dianalisis menggunakan ideologi tubuh dan isu-isu seperti tenaga kerja dan lingkungan.” Perusahaan.

Sementara Kesselman Binder dan rekan-rekannya mampu menjauh dari kebijaksanaan konvensional bahwa pluralisme, stabilitas politik, dan akhir ideologi adalah tanda-tanda kemajuan, mereka mau tidak mau menekankan perubahan dan krisis. Mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan untuk kekuatan ini. tanpa adanya prinsip-prinsip perubahan, perubahan dan rekonstruksi, maka keberadaan perubahan dipandang sebagai sesuatu yang kontingen dan historis” (Kesselman 1973: 184-189).

Perkembangan politik Pandangan kehidupan masyarakat biasa atau masyarakat industri erat kaitannya dengan pandangan bahwa perkembangan politik sama dengan reformasi politik. Ukuran reformasi politik adalah partisipasi politik. Lucian W. Pye menulis banyak cerita politik.

Pertama, pembangunan politik adalah proses politik pembangunan ekonomi. Pembangunan politik dipandang sebagai isu sosial-politik yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih mudah untuk mendefinisikan bagaimana pencapaian suatu sistem politik menghambat pertumbuhan ekonomi

daripada menjelaskan bagaimana sistem tersebut menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan politik yang kedua adalah kehidupan politik masyarakat industri yang sebenarnya. Masyarakat industri menciptakan bentuk kehidupan politik tertentu yang ditiru oleh masyarakat lain. Pembangunan politik konseptual diperlukan untuk menjelaskan beberapa metode atau strategi/proses yang digunakan dalam bidang pembangunan untuk mencapai tujuannya. Metode atau strategi tersebut adalah pemerintah, lembaga/organisasi atau partai politik, serta warga negara atau masyarakat sipil. . . Tim. Jadi, dalam praktiknya, banyak kemajuan berasal dari tindakan politik yang dilakukan oleh para aktor. Tata kelola dengan cara lain, seperti lembaga, partai politik atau bahkan kelompok masyarakat.

Ketiga, pembangunan politik seperti reformasi politik. Kehidupan masyarakat industri yang normal atau baik sesuai dengan pandangan bahwa perkembangan politik sama dengan reformasi politik. Strategi reformasi politik: partisipasi politik, persyaratan hukum internasional, penghormatan terhadap hak kelahiran, keadilan dan kebangsaan.

Keempat, pembangunan politik adalah kegiatan nasional-negara. Pembangunan politik adalah proses transformasi masyarakat suatu bangsa menjadi bangsa yang sejati berdasarkan pengakuan internasional. Langkah-langkah pengembangan kebijakan adalah sebagai berikut: Pertama, membuat rantai institusi publik dan swasta yang membentuk infrastruktur negara. Kedua, masalah ketertiban dalam kehidupan politik, bukan patriotisme, yang muncul dalam lembaga-lembaga negara.

Kelima, pembangunan politik, serta pembangunan administrasi dan hukum. Jika pembangunan negara dibagi menjadi pembangunan kelembagaan dan pembangunan sipil, maka ada dua pengertian: pembangunan administrasi dan pembangunan hukum (menciptakan struktur administrasi dan lembaga hukum).

Keenam, pembangunan politik seperti advokasi dan partisipasi aktif. Bagian kedua dari perkembangan politik terkait dengan partisipasi publik dan langkah-langkah baru di sektor publik dan partisipasi.

Ketujuh, pembangunan politik seperti pembangunan demokrasi. Pembangunan politik harus ditentukan oleh pelembagaan dan proses demokrasi. Pembangunan politik jelas dipahami sebagai pembangunan demokrasi. Pembangunan hanya bermakna dalam arti ideologi (demokrasi komunis atau kediktatoran) dan menciptakan tingkat nilai tertentu.

2.2.3 Teori Pembangunan Desa

Seperti yang dikemukakan Rostow (1971), konsep pengembangan tidak hanya menghasilkan lebih banyak produk, tetapi juga menghasilkan lebih banyak produk. Kemajuan dalam perkembangannya melewati periode waktu bagi masyarakat tradisional, prioritas kebutuhan untuk pertumbuhan, perbaikan dan penggunaan banyak. Dalam kasus ini, periode yang paling penting adalah waktu pergerakan yang dikendalikan oleh satu atau lebih bagian. Perkembangan pesat industri penting ini menarik sedikit energi ekonomi.

Menurut Hanafi (1892), konsep pembangunan berubah karena pengalaman tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang ditujukan

untuk meningkatkan pendapatan nasional tidak dapat menyelesaikan masalah pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa program pendapatan nasional meningkat setiap tahun tanpa meningkatkan taraf hidup banyak orang. Di sisi lain, ada kesalahan besar dalam persepsi kata kemajuan.

Menurut Haeruman (1997), ada dua cara untuk menjelajahi pedesaan:

- a. Pembangunan pedesaan dianggap sebagai proses alami tergantung pada kemampuan dan kapabilitas desa. Pendekatan ini meminimalkan gangguan luar untuk membawa perubahan yang diinginkan dalam jangka panjang.
- b. Di sisi lain, pembangunan pedesaan adalah interaksi potensi pedesaan dan proyek-proyek eksternal yang mempercepat pembangunan pedesaan.
- c. Pembangunan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 “Tentang Desa” Tahun 2005, perencanaan pembangunan desa disusun bersama oleh pemerintah desa dalam kewenangan pemerintahannya. Menurut Pasal (3), penting bagi lembaga negara untuk berpartisipasi dalam pengembangan program pembangunan pedesaan. Tujuan dari rencana pembangunan adalah:
 1. Koordinasi badan-badan pembangunan.
 2. Pengawasan koordinasi dan kerjasama pembangunan daerah.
 3. Mengetahui konsistensi dan koordinasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan.
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat

5. Untuk memastikan penggunaan sumber daya pedesaan yang efektif, efisien, adil dan jangka panjang.

Kebijakan perencanaan pembangunan pedesaan adalah seperangkat pedoman dan peraturan yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat, disetujui atau diadopsi dalam perencanaan (pengelolaan) pembangunan pedesaan.

Konsep Pendekatan Disiplin Baru Pembangunan Perdesaan Strategi pembangunan perdesaan dilaksanakan melalui koordinasi berbagai lembaga dalam pembangunan perdesaan dalam rangka mengubah cara hidup pedesaan. Pelaksanaan langkah-langkah pembangunan pedesaan menyebabkan perubahan yang signifikan, terutama dalam kondisi sosial ekonomi penduduk pedesaan. Namun, konsep pembangunan pedesaan tidak mengarah pada reformasi sosial di pedesaan. Mengapa orang tidak berubah? Karena kebijakan baru pembangunan pedesaan tidak memperkuat kelembagaan pedesaan dan otonomi pedesaan, tetapi di sisi lain melemahkan, menghancurkan dan menghancurkan otonomi pedesaan. Upaya pembangunan desa satu arah masih terlihat besar-besaran pada masa reformasi. Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Departemen telah mengembangkan program serupa Bantuan Langsung (BLM) di pedesaan. Program-program yang ada di desa tidak hanya dibagi berdasarkan fungsi, tetapi juga berdasarkan sumber pendanaan. Sekali lagi, dalam pengertian ini, desa hanyalah sebuah tempat, bukan panggung, untuk menarik sumber daya dan institusi pembangunan.

Setiap program memiliki pengadilannya, aturan main yang berbeda dan organisasi proyek, tetapi berakhir di tempat yang sama, di desa tempat program itu berada. Akibatnya, program pengelolaan program dihentikan. Program ini didasarkan pada model integrasi prioritas kesehatan masyarakat, praktik pengelolaan sumber daya lokal dan peta masalah lokal. Secara grafis, program ini memang berada di luar desa, namun tentu mengganggu. Selain itu, program BLM tidak menjawab kebutuhan desa seperti pemberdayaan pemerintah daerah, peningkatan partisipasi, pemberdayaan warga desa dan masyarakat desa, dan otonomi dalam mengelola keuangan kota.

Gambar 2.1.

Strategi Membangun Desa



Sumber: Buku 5: Desa Mandiri, Desa Membangun

Ada banyak strategi yang digunakan untuk membangun desa. Pertama, membangun kapasitas masyarakat pedesaan dan lembaga swadaya masyarakat yang kuat dan berdaya. Pembentukan lembaga publik dan lembaga swadaya masyarakat seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mengancam hak-hak publik. Namun, hal ini merupakan sumber penting bagi terwujudnya kemandirian

di desa dan awal terbentuknya masyarakat pedesaan, yang kemudian menjadi kekuatan melawan kebijakan pemerintah yang tidak ikut serta dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, penguatan kapasitas pemerintah dan kerjasama lembaga swadaya masyarakat dalam pemerintahan pedesaan. Ada banyak cerita tentang kemandirian pedesaan yang didukung oleh teknik swakelola pedesaan melalui kekuatan LSM. Seperti yang dapat Anda baca pada kotak di atas, K.K. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mendorong pemerintah desa yang dipimpin rakyat untuk membentuk pemerintahan desa yang peduli terhadap hak-hak rakyatnya. Kerjasama antara pemerintah otonomi pedesaan dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kekuatan khusus untuk menemukan pemimpin lokal dan pemimpin desa yang peka terhadap rakyat dan mau berinovasi dan berkembang. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa tentunya tidak hanya tercermin dari kemampuan teknis aparatur desa dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan. Tetapi juga tercermin dalam peran HRP dalam menetapkan strategi dan rencana aksi. Tabel berikut memberikan contoh membangun demokrasi di desa menurut UU BPD no. 6 tahun 2014 tentang kota.

Ketiga, pembangunan dan partisipasi dalam program sensus penduduk. Membangun masyarakat yang berkelanjutan dan mandiri biasanya membutuhkan program perencanaan masyarakat yang didukung dengan baik. Dia tidak di hadapan hukum. Pada tahun 2014, 6 desa masuk dalam rencana pembangunan desa komprehensif. Acuan atau landasan hukum pada saat itu adalah UU No. 32 Tahun 2004. Pengerjaan program pembangunan pedesaan berdasarkan UU No. 32 Tahun

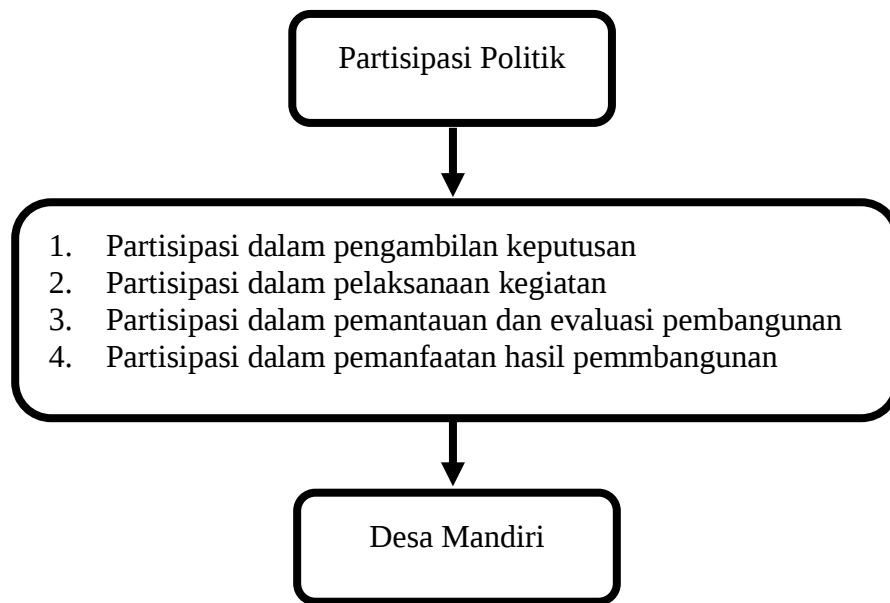
2004, telah disetujui oleh Dirjen No. 72 "Pengelolaan pedesaan". Namun, dalam praktiknya, masyarakat diharapkan membuat pengaturan. Rekomendasi untuk program ini adalah agar masyarakat dan dewan desa tidak ikut serta dalam politik program pembangunan daerah. Badan Desa tidak mengeluh bahwa daftar rekomendasi dari program RCP Desa diabaikan menjadi daftar permintaan. Meskipun perjuangan dilakukan melalui Federasi Musrenbangkam, Federasi SKPD dan Federasi Musrenbangkab, tuntutan utama rakyat tidak dipenuhi karena kepentingan pihak non-rakyat untuk berpartisipasi dalam politik pembangunan daerah. Terakhir, sebagian besar APBD digunakan untuk membiayai program-program daerah. Dalam kasus proyek pembangunan pedesaan, hanya manajer proyek yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, bukan manajer proyek.

Keempat, untuk membangun pusat ekonomi yang mandiri dan produktif, saat ini banyak program pedesaan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi lokal. Keberhasilan ekonomi tidak tergantung pada kemampuan desa untuk mengembangkan program perencanaan dan penganggaran desa yang berkelanjutan, fleksibel dan terintegrasi (RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa).

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan bentuk penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. (Usman, 2014:34). Penelitian ini memiliki kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Kerangka Berfikir Penelitian



Sumber: Hasil Data Analisis Peneliti